

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI  
SELATAN**

Muh. Fajar Fikriansyah B  
NPP. 32.0897

*Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email : [fajarfikriansyahb@gmail.com](mailto:fajarfikriansyahb@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Lilis Sholihah, S.Ag., M.Ag., M.Tr.IP.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Political participation of the Bulukumba Regency community in regional head elections has not yet reached the national target of 77.5%. **Purpose:** This study aims to analyze the level of political participation of the people of Bulukumba Regency, examine the influence of the dimensions of social capital by Robert Putnam (2001), namely trust, social networks, and norms on the political participation of the people, and identify the obstacles faced in increasing the political involvement of the people. **Method:** The method used in this study is descriptive qualitative with an inductive approach. Data were obtained through in-depth interviews and documentation from various informants, namely from Kesbangpol, KPU, community leaders, and local residents. **Results/Findings:** The results of the study show that public participation in the last election, namely the 2024 Pilkada, only reached 65.57%, still below the national target. This low participation is influenced by weak social capital, such as low trust in political institutions, minimal social networks that encourage political involvement, and social norms that do not fully support active participation. **Conclusion:** The obstacles include the lack of interactive political socialization and education. Thus, in increasing political participation, strengthening of community social capital and the active role of local government is needed. Therefore, it is recommended that the Bulukumba Regency National Unity and Politics Agency optimize social media and digital platforms as a means of political education, and consistently hold activities such as seminars and public discussions every year to increase public awareness and involvement in the democratic process.

**Keywords:** Political Participation, Social Capital, Kesbangpol.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam pemilihan kepala daerah selama ini belum mencapai target nasional sebesar 77,5%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bulukumba, mengkaji pengaruh dimensi modal sosial oleh Robert Putnam (2001) yakni kepercayaan, jaringan sosial, dan norma terhadap partisipasi politik masyarakat tersebut, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dari berbagai informan, yakni dari Kesbangpol, KPU, tokoh masyarakat, dan warga setempat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilihan terakhir yakni Pilkada 2024 hanya mencapai 65,57%, masih di bawah target nasional. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh lemahnya modal sosial, seperti rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik, minimnya jaringan sosial yang mendorong keterlibatan politik, serta norma sosial yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi aktif. **Kesimpulan:** Hambatannya mencakup kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik yang interaktif. Sehingga, dalam peningkatan partisipasi politik dibutuhkan penguatan modal sosial masyarakat dan peran aktif pemerintah daerah. Oleh karena itu, disarankan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba mengoptimalkan media sosial dan platform digital sebagai sarana pendidikan politik, serta secara konsisten setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Modal Sosial, Kesbangpol.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan, serta kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaannya. Konsep ini menjadi krusial dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi politik ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga negara, mulai dari pemilihan umum, bergabung dengan organisasi politik, hingga memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Dalam kondisi tersebut, partisipasi ini mencerminkan indikasi positif bahwa keterlibatan politik masyarakat telah berjalan dengan baik. Menurut (Wardhani, 2018) semakin tinggi partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik biasanya mengindikasikan kurangnya minat atau apresiasi masyarakat terhadap masalah-masalah kenegaraan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pilkada adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang penting untuk mewujudkan demokrasi, memenuhi hak-hak politik warga negara, serta

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Pada hakekatnya demokrasi melalui mekanisme pemilihan langsung bertujuan untuk membuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin pemerintahan. (Labolo, 2016).

Menurut (Rowa, 2015), dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk bebas berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara. Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak diakhir tahun 2024 di berbagai daerah yang disebut Pilkada Serentak. Pemilihan kepala daerah serentak ini menimbulkan polemik bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, terutama di Kabupaten Bulukumba yang melaksanakan pilkada. Hal ini tercermin dalam data partisipasi masyarakat yang menunjukkan tren partisipasi dalam tiga pemilihan kepala daerah terakhir.

Berdasarkan data yang ditemukan, partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah jika melihat dari tiga pesta demokrasi terakhir. Pada, Pilkada 2010, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 58.35 persen sedangkan pada Pilkada 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 58.43 persen dan kemudian kemabli mengalami peningkatan yang signifikan pada Pilkada 2020 menjadi 74,25%, namun tetap belum mencapai 77,5 persen yang merupakan target partisipasi masyarakat yang ditetapkan secara nasional. dengan ditemukan permasalahan partisipasi politik yang rendah di Kabupaten Bulukumba yang belum mencapai persentase yang diharapkan oleh pemerintah yaitu 77,5%, maka menjadi penting dan menarik untuk diteliti.

Dalam konteks Bulukumba, adanya faktor-faktor seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi, kurangnya keterlibatan dalam jaringan sosial yang aktif, atau budaya politik yang kurang mendorong partisipasi memperlihatkan adanya kelemahan dalam modal sosial masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sebagai hasil dari berdiskusi politik dengan orang lain, setidaknya sebagian bergantung pada apakah mereka memercayai atau tidak dari orang yang mereka ajak bicara. (Vaccari & Valeriani, 2018). Putnam dalam (Santoso, 2020) juga berpendapat bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat sering kali disebabkan oleh lemahnya ikatan sosial, kepercayaan antarwarga, dan keterlibatan dalam organisasi sosial yang mendukung partisipasi demokratis.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kabupaten Bulukumba dalam perjalanannya, partisipasi masyarakat belum pernah mencatatkan menyentuh target angka nasional. Fakta bahwa tingkat partisipasi masyarakat Bulukumba pada Pilkada 2010 hanya 58.35 persen dan sedikit meningkat pada Pilkada 2015 menjadi 58.43 persen dan kemudian meningkat menjadi 74,25 persen pada Pilkada 2020, namun masih menunjukkan di bawah target nasional 77,5%, memperlihatkan adanya kelemahan dalam modal sosial masyarakat. Modal sosial menjadi penting digunakan untuk menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Modal sosial mengacu pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks modal sosial maupun konteks partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Penelitian Yenni Tria Lestari, Akbar Taufiq Amrullah dan Yanti Haryani berjudul “Penguatan Peran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa melalui Program Pengabdian Masyarakat” (Lestari et al., 2024), menemukan bahwa program pengabdian masyarakat berhasil secara signifikan meningkatkan partisipasi politik warga desa. Sebelum adanya intervensi, hanya 30% warga yang berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Namun, setelah pelaksanaan program, partisipasi meningkat hingga mencapai 65%. Pemahaman warga mengenai pentingnya partisipasi politik dan proses pemilihan juga meningkat dari 40% menjadi 80%. Penelitian Safiudin dan Damayanti berjudul “Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024” (Safiudin & Damayanti, 2024), menemukan adanya peningkatan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat, ditunjukkan oleh data yang memperlihatkan peningkatan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga Gadingrejo setelah dilaksanakan kegiatan edukasi KPPS. Pemberdayaan KPPS turut berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian Hendra, Abu Bakar dan Muci Herliyanto berjudul “Modal Sosial Masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan Dalam Partisipasi Politik” (Hendra dkk., 2023), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yang membentuk modal sosial masyarakat setempat, yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma. Media massa berperan sebagai salah satu komponen modal sosial yang mendorong partisipasi politik masyarakat. Melalui media massa, masyarakat dapat mengenal calon-calon yang akan bersaing dalam proses demokrasi. Peran media massa sangat signifikan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Aspek kepercayaan juga menjadi elemen penting dalam konteks politik. Penelitian yang dilakukan Restu yang berjudul “Modal Sosial Anggota Dprd Terpilih Tiga Periode Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi di Kabupaten Pesawaran)” (Restu, 2023), menemukan bahwa modal sosial memainkan peran penting dalam kontestasi politik, di mana setiap kandidat membutuhkan modal ini sebagai kekuatan dasar untuk bersaing dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, jaringan, dan norma, membantu kandidat dalam membangun hubungan yang mendalam dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperbesar peluang kemenangan. Penelitian Kurniawan berjudul “Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial” (Kurniawan, 2018), menemukan bahwa modal sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh faktor budaya, hukum, dan ketidakadilan dalam masyarakat.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus untuk mengetahui dan mendeksripsikan dampak modal sosial terhadap partisipasi politik masyarakat serta hambatan yang dimiliki masyarakat dalam berpartisipasi politik di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Putnam dalam (Santoso, 2020:188) yang

menyatakan bahwa modal sosial terdiri atas sepuluh indikator diantaranya, jaringan sosial, norma, solidaritas, toleransi, kepercayaan, kerjasama, akuntabilitas, kemitraan, partisipasi dan responsivitas

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten bulukumba dalam mencapai target nasional menggunakan teori modal sosial yang terdiri dari elemen kepercayaan (*Generalized trust*), jaringan sosial (*Networks of Civic Engagement*) dan norma (*norms of Reciprocity*).

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam makna di balik perilaku, pandangan, dan interaksi sosial individu maupun kelompok dalam konteks kehidupan sosial. (Machmud, 2016). Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran mendetail mengenai fenomena sosial yang sedang dikaji dengan cara menguraikan nilai-nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa menghubungkannya atau membandingkannya dengan variabel lain. (Wekke dkk., 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis secara mendalam melakukan diskusi terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Kesbangpol), Camat Ujung Bulu dan masyarakat. Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2019)

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan, namun masih belum mampu memenuhi target nasional sebesar 77,5 persen. Partisipasi politik masyarakat melalui pemilu belum maksimal. Begitu pun dalam pilkada juga tidak stabil, letak permasalahannya terdapat pada kuatnya pola pikir pragmatis dan rendahnya kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya hak untuk memilih. Meski belum mencapai target nasional, masyarakat sangat aktif menyuarkan aspirasi lewat demonstrasi

Penulis menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kabupaten bulukumba menggunakan teori modal sosial menggunakan pendapat Putnam dalam (Santoso, 2020:188). Adapun pembahasan sebagai berikut.

### **3.1. Kepercayaan**

Kepercayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh jaringan sosial dan norma yang berkembang di lingkungan sosial. Dalam hal ini terdapat dua sub-dimensi pada dimensi kepercayaan yang berdampak dalam mendukung partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Jaringan sosial

Jaringan sosial, ikatan sosial, dan keterlibatan masyarakat terhadap partisipasi sipil dan politik, melalui jaringan mereka yang kuat yang dianggap penting dalam memperkuat lembaga politik dan demokrasi. (Ida dkk., 2025)

Dalam pemilihan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, terutama hubungan kekeluargaan. Kedekatan kekerabatan, baik secara langsung maupun melalui kelompok sosial seperti komunitas agama, pertemanan, atau hobi, berperan dalam membentuk preferensi politik. Modal sosial lebih kuat di beberapa wilayah pegunungan dibandingkan wilayah pesisir.

b. Norma

Penelitian ini menunjukkan bahwa norma agama dan adat, berkontribusi untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Norma agama membangun kesadaran moral dalam menggunakan hak pilih, sedangkan norma adat memperkuat keterlibatan politik, seperti yang terlihat pada masyarakat adat Kajang. Secara keseluruhan, norma sosial membentuk kesadaran kolektif dan sikap aktif warga terhadap politik.

### 3.2. Jaringan Sosial

Jaringan sosial yang dimiliki masyarakat dalam konteks peningkatan partisipasi politik didasarkan pada solidaritas, toleransi, kepercayaan, dan kerja sama. Dalam hal ini terdapat dua sub-dimensi pada dimensi jaringan sosial yang berdampak dalam mendukung partisipasi politik masyarakat yaitu toleransi dan kepercayaan. Namun, dua sub dimensi lainnya tidak mendukung partisipasi politik masyarakat yakni, solidaritas dan kerjasama di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Solidaritas

Pemerintah dan masyarakat dalam politik sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meskipun terdapat solidaritas antara pemerintah dan masyarakat, tingkat keterlibatan serta bentuk konkretnya masih terbatas. Solidaritas ini lebih bersifat normatif daripada berbentuk dukungan aktif dalam kebijakan atau partisipasi langsung.

b. Toleransi

Toleransi adalah ruang untuk bertukar pikiran yang dipahami sebagai dasar fundamental untuk dialog di mana orang-orang yang berpandangan berbeda memiliki kesempatan untuk mendengar dari sudut pandang yang lain. (Wilson, 2014). Toleransi antar masyarakat tetap terjaga dalam kehidupan nyata meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, sehingga konflik serius jarang terjadi. Namun, di media sosial, perbedaan pendapat sering kali memicu ketegangan, menunjukkan kontras antara interaksi langsung dan dunia maya. Menjelang pemilu, tensi politik meningkat, tetapi setelahnya, hubungan antar pendukung cenderung kembali harmonis, mencerminkan kuatnya nilai sosial saling menghargai.

c. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat yang masih kuat sehingga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Hal ini terlihat dari kemenangan bupati dalam pilkada yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi. Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu meskipun tidak mencapai target menjadi indikator bahwa mereka masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, sebagaimana dibuktikan dengan dukungan mayoritas kepada bupati petahana pada pilkada sebelumnya.

d. Kerjasama

Kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Pemerintah memiliki peran utama dibantu oleh mitranya dalam memberikan pendidikan politik, namun tanggung jawab ini juga harus didukung oleh masyarakat dengan wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih saja kurang aktif.

### 3.3. Norma

Norma ini didasarkan pada prinsip timbal balik yaitu saling memberi dan menerima, yang memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat satu sub-dimensi pada dimensi norma yang berdampak dalam mendukung partisipasi politik masyarakat yaitu responsivitas. Namun, tiga sub dimensi lainnya tidak mendukung partisipasi politik masyarakat yakni, akuntabilitas, kemitraan dan partisipasi di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Dalam hal ini pemerintah belum menyediakan platform digital namun masih didukung dari KPU yang telah menyediakan situs web seperti PPID dan Rumah Pintar Pemilu menyediakan akses serta edukasi mengenai pemilu masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi pemilu, namun, masih banyak yang belum memanfaatkan platform digital yang telah disediakan. Sehingga, platform tersebut masyarakat belum merasakan dampaknya.

b. Kemitraan

Kemitraan menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memainkan peran strategis dalam menjaga netralitas dan profesionalisme guna memastikan integritas pemilu. Namun, tantangan tetap ada banyak organisasi masyarakat dan partai politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibanding memberikan pemahaman yang objektif kepada publik. Ketimpangan ini dapat menghambat efektivitas pendidikan politik dan mengurangi kualitas partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat telah ditunjukkan dengan berbagai masukan mengenai peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun, prioritas saat ini masih pada

edukasi pemilih pemula karena keterbatasan sumber daya. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi masih dinilai pasif.

d. Responsivitas

Responsivitas pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat tidak hanya bergantung pada tindakan langsung, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari 10 atribut teori modal sosial yang digunakan dalam menganalisis dampaknya terhadap partisipasi politik di Kabupaten Bulukumba, hanya 5 yang hasilnya berdampak mendukung peningkatan partisipasi politik yaitu jaringan sosial, norma, toleransi, kepercayaan dan responsivitas. Sedangkan, 5 atribut lainnya tidak mendukung peningkatan partisipasi politik yaitu solidaritas, kerja sama, akuntabilitas, kemitraan, dan partisipasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra, Abu Bakar dan Muci Herliyanto berjudul "Modal Sosial Masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan Dalam Partisipasi Politik" (Hendra dkk., 2023), yang bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yang membentuk modal sosial masyarakat setempat, yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma. Media massa berperan sebagai salah satu komponen modal sosial yang mendorong partisipasi politik masyarakat. Melalui media massa, masyarakat dapat mengenal calon-calon yang akan bersaing dalam proses demokrasi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis ditemukan bahwa yang sangat berperan untuk mendorong partisipasi politik adalah jaringan sosial yang dimiliki masyarakat. Media massa juga masih sebatas memperkenalkan calon kandidat, dan tidak berperan penting dalam peningkatan partisipasi politik.

Penelitian yang dilakukan Restu yang berjudul "Modal Sosial Anggota Dprd Terpilih Tiga Periode Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi di Kabupaten Pesawaran)" (Restu, 2023), menemukan bahwa modal sebagai kekuatan dasar untuk bersaing dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, jaringan, dan norma, membantu kandidat dalam membangun hubungan yang mendalam dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperbesar peluang kemenangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menemukan bahwa ketika modal sosial dalam masyarakat tinggi maka partisipasi juga akan meningkat. Hal ini terbukti, di beberapa daerah di kabupaten bulukumba memiliki modal sosial yang kuat sehingga masyarakatnya banyak juga yang turut berpartisipasi dalam pemilihan atau kegiatan politik lainnya. Hal ini juga diperkuat pada penelitian sebelumnya, (Sudarmono, 2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung lebih stabil dan memiliki layanan publik yang lebih efektif, yang pada gilirannya mendorong partisipasi politik.

Penelitian Kurniawan berjudul "Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial" (Kurniawan, 2018), menemukan bahwa modal sosial dalam konteks demokrasi di Indonesia masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh faktor budaya, hukum, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan penulis menemukan hal berbeda bahwa hambatan terbesarnya karena di beberapa daerah lain di kabupaten bulukumba juga masih banyak masyarakat yang masih apatis dan kurang peduli satu sama yang lain.

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada yakni kurangnya pendidikan dan sosialisasi politik karena keterbatasan anggaran, sehingga menjadikan masyarakat menjadi apatis dan kurang sadar terkait pentingnya berpartisipasi politik.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bulukumba masih belum mencapai target nasional. Ditandai dengan faktor penghambat berupa pertama keterbatasan anggaran untuk pendidikan politik. Dalam hal ini masih belum maksimalnya pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait pentingnya hak pilih karena minimnya anggaran. Kedua, masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan pilkada. Masyarakat belum sadar terkait pentingnya berpartisipasi politik untuk yang merupakan bentuk legitimasi terhadap pemimpin daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Singkatnya waktu penelitian menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan observasi secara langsung dari proses politik yang terjadi.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bulukumba untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Kesbangpol), Camat Ujung Bulu dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Labolo, M. (2016). Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 1-15. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2790>.

Rowa, H. (2015). Demokrasi dan kebangsaan Indonesia. <http://eprints.ipdn.ac.id/13595/1/BUKU%20DEMOKRASI%20DAN%20KEBANGSAAN.pdf>.

Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. *Memahami Modal Sosial (I)*. <http://repository.petra.ac.id/18928/>

Sudarmono. (2021). Pembangunan Modal Sosial. In *Rtujuh Media Printing*.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.

Wekke, I. S., Mulyadi, A., Aini, N., Yudityo, H., Bugis, Ek. H., Rahmawati, I., Kausarillah,

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

## **JURNAL**

Hendra, Bakar, A., & Muci, H. (2023). Modal Sosial Masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan Dalam Partisipasi Politik. *Modal Sosial Masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan Dalam Partisipasi Politik*, 2(1), 26–34. <https://doi.org/10.56783/js.v1i1>.

Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>

Kurniawan, I. D. (2018). *Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial*. 29(1). <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14600>.

Lestari, Y. T., Amrullah, A. T., Haryani, Y., Negeri, I., Aji, S., Idris, M., Kalimantan, I. T., & Timur, K. (2024). *Penguatan Peran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa melalui Program Pengabdian Masyarakat politik yang sesuai dengan konstitusi . Pemerintahan yang baik berfungsi sebagai terhadap pemerintahan tetapi juga menunjukkan keterlibatan pikiran , kura.* 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.47766/ibrah.v3i1.2109>.

Vaccari, C., & Valeriani, A. (2018). Digital Political Talk and Political Participation: Comparing Established and Third Wave Democracies. *SAGE Open*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/2158244018784986>

Wardhani, Nur P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://core.ac.uk/download/pdf/201178757.pdf>.

Wilson, H. F. (2014). The possibilities of tolerance: Intercultural dialogue in a multicultural Europe. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32(5), 852–868. <https://doi.org/10.1068/d13063p>

Restu, N. S. P. (2023). Modal Sosial Anggota Dprd Terpilih Tiga Periode Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://digilib.unila.ac.id/70344/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMABAHASA%20N.pdf>.

Safiudin, K., & Damayanti, A. (2024). Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 136–143. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp136-143>.